



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERITAH DAERAH (SIPD)
PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH BPKPAD KABUPATEN
PURWOREJO**

Rosiana Khafida¹, Ari Nurul Fatimah²

Universitas Tidar^{1,2}

rosianak454@gmail.com ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Abstract

The Regional Government Information System (SIPD) is an information system developed by the Ministry of Home Affairs to support the integrated processes of planning, budgeting, implementation, and financial reporting of local governments, as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning the Regional Government Information System. This study aims to analyze the implementation of SIPD in the Regional Treasury Division of BPKPAD Purworejo Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results show that the implementation of SIPD has brought positive impacts on the efficiency of regional financial management. However, there are still several challenges, such as technical system disruptions, limited human resources, and the need for internal work structure improvements. Based on these findings, enhancement strategies need to be implemented to ensure optimal execution of SIPD.

Keywords: *Implementation, Regional Government Information System, Regional Treasury Division*

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efisiensi dan efektivitas berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (Anggraeni & Irvani, 2017). Sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap data keuangan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

Salah satu sistem yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya regulasi baru mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang menggantikan Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Regulasi ini mulai berlaku sejak September 2019 dan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan serta menerapkan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri, 2019).

Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo merupakan salah satu bidang yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 138 Tahun 2022, bidang ini bertanggung jawab atas pengelolaan kas daerah, pencairan anggaran, serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Perbup Purworejo, 2022). Oleh karena itu, penerapan SIPD di bidang perbendaharaan daerah menjadi aspek penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.



Namun dalam implementasinya, penerapan SIPD menghadapi kendala teknis dan kebijakan. Sistem yang belum sepenuhnya siap sering mengalami gangguan seperti eror dan keterbatasan akses, sementara kurangnya bimbingan teknis membuat pegawai harus belajar secara mandiri. Selain itu, implementasi yang mendadak tanpa aplikasi pendamping menyebabkan keterlambatan transaksi belanja dan pembayaran. Minimnya informasi pembaruan sistem juga sering menghambat proses perbendaharaan daerah, teknologi informasi, serta adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi keuangan daerah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman aparatur terhadap sistem, keterbatasan akses terhadap jaringan internet di beberapa wilayah, serta kendala teknis yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional perbendaharaan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Fokus penelitian mencakup efektivitas sistem dalam mendukung proses administrasi keuangan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD di lingkungan pemerintahan daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di BPKPAD Kabupaten Purworejo, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu peningkatan implementasi sistem ini di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem administrasi keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Zuchri Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji



masalah secara khusus karena penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Zuchri Abdussamad, 2021). Penelitian ini digunakan untuk memahami penerapan SIPD secara mendalam, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi di bidang perbendaharaan daerah.

Objek penelitian ini yaitu BPKPAD Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111, Plaosan, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan lebih tepatnya pada Bidang Perbendaharaan Daerah.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni, 2014). Berdasarkan cara memperolehnya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer, antara lain wawancara, observasi, atau diskusi terfokus (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Lasmini, S.E., M.Acc. sebagai Ketua Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bapak Muhammad Fauznil Adhim, A.Md.Ak. sebagai pelaksana pengolah data dan informasi. Wawancara ini berhubungan dengan penerapan aplikasi SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel dan jurnal mengenai penerapan SIPD yang dipakai sebagai referensi penelitian, peraturan perundang-undangan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dari BPKPAD Kabupaten Purworejo yang didapat melalui internet.

Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian (Iba & Wardhana, 2023). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta (Hasanah, 2017). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana SIPD diterapkan dalam operasional bidang perbendaharaan daerah di BPKPAD Kabupaten Purworejo. Pengamatan ini mencakup aspek teknis penggunaan sistem serta kendala yang terjadi selama proses implementasi.

Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti (Brinkmann & Kvale, 2015). Wawancara dilakukan terhadap pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIPD yaitu wawancara dengan Ibu Lasmini, S.E., M.Acc. sebagai Ketua Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bapak Muhammad Fauzhil Adhim, A.Md.Ak. sebagai pelaksana pengolah data dan informasi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam mengoperasikan sistem, manfaat yang diperoleh, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan SIPD.

Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis data yang diperoleh dari lapangan. Referensi yang digunakan meliputi buku-buku yang membahas teori implementasi kebijakan publik, khususnya model implementasi kebijakan dari Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, digunakan juga regulasi yang relevan,

E-ISSN :3025 -8758
P-ISSN :3025 -9290

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*



seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam penerapan SIPD di seluruh daerah. Penelusuran artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi dari laman



Kementerian Dalam Negeri juga dijadikan rujukan dalam memahami konteks dan perkembangan sistem SIPD secara nasional.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk ditemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah sebuah penelitian (Suryabrata, 2014). Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi agar lebih terfokus pada tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas, manfaat, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo merupakan instansi daerah yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah. Instansi ini memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKPAD Kabupaten Purworejo menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 . SIPD merupakan sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem ini juga digunakan untuk menyampaikan data dan



informasi sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan kebijakan nasional. Mount Hope Economic Global Journal

Bidang Perbendaharaan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Purworejo merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengelolaan kas daerah. Penerapan SIPD di bidang ini sangat penting karena menyangkut kelancaran arus kas dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana penerapan SIPD berjalan di bidang perbendaharaan daerah serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi SIPD, khususnya pada bidang perbendaharaan daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat diterapkan secara optimal serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul di lapangan. Untuk itu, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward

III. Teori ini memfokuskan pada empat variabel utama yang saling berkaitan dalam proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2022)

Dalam implementasi SIPD di Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten



Purworejo, komunikasi menjadi faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, telah terjalin komunikasi yang cukup baik antarpegawai dalam satu bidang, yang memungkinkan adanya koordinasi teknis saat menghadapi kendala operasional dalam sistem. Komunikasi vertikal dengan pimpinan juga berlangsung cukup lancar, sehingga arahan dan informasi kebijakan dapat disampaikan dengan baik. Selain itu, komunikasi dengan pemerintah pusat melalui media daring seperti *zoom meeting* telah difasilitasi, sehingga pegawai memiliki akses terhadap informasi dan panduan teknis, meskipun tanggapan yang diberikan masih kurang cepat dan tidak selalu sesuai kebutuhan.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, sering kali terjadi perubahan atau pembaruan fitur dalam sistem tanpa disertai sosialisasi dan bimbingan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pegawai, terutama dalam penggunaan fitur-fitur baru. Meskipun komunikasi internal dalam lingkup bidang perbendaharaan berjalan cukup baik, masih terdapat tantangan dalam komunikasi lintas bidang atau dengan pihak terkait lainnya yang menyebabkan ketidaksamaan persepsi terhadap prosedur penggunaan SIPD. Oleh karena itu, komunikasi khususnya dalam konteks operasional Bidang Perbendaharaan Daerah perlu diperkuat agar koordinasi teknis dan pemahaman terhadap sistem dapat lebih merata dan efektif.

Sumber Daya (*Resources*)

Edward III (dalam Widodo, 2022) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Dalam penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, faktor sumber daya memegang peranan penting. Dari sisi sumber daya



manusia, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menguasai sistem SIPD karena minimnya pelatihan yang diberikan secara menyeluruh. Sebagian pegawai harus mempelajari sistem secara mandiri atau meminta bantuan pada rekan kerja. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pemahaman antarpegawai dalam mengoperasikan sistem.

Sementara itu, dari sisi teknis, kendala yang paling dominan berasal dari sistem SIPD itu sendiri yang dikembangkan secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini sering mengalami gangguan seperti lambat diakses, eror saat proses penyimpanan data, serta tidak berfungsinya fitur tertentu secara tiba-tiba. Masalah-masalah ini menghambat kelancaran proses administrasi keuangan seperti pencairan dana dan penerbitan SP2D. Hal tersebut menjadi tantangan utama bagi pegawai di Bidang Perbendaharaan Daerah karena mereka berada di posisi yang sangat bergantung pada sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi penyaluran dan pengelolaan kas daerah.

Diposisi atau Sikap Pelaksana (*Dispositions*)

Pandangan dan sikap para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Jika mereka memiliki sikap positif terhadap kebijakan tersebut, maka besar kemungkinan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika sikap mereka negatif, keberhasilan kebijakan pun akan terhambat. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan (Kasmad, 2018).

Sikap para pelaksana di Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo terhadap penerapan SIPD secara umum menunjukkan dukungan yang positif. Para pegawai menyadari bahwa penggunaan SIPD merupakan kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Komitmen untuk menjalankan sistem ini terlihat dari kesungguhan mereka dalam menyelesaikan tugas, meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala teknis dalam operasional sehari-hari.

Meskipun demikian, sikap positif ini tidak serta-merta diikuti oleh tingkat pemahaman dan keterampilan yang merata di antara seluruh pegawai. Beberapa pegawai masih merasa kebingungan dalam menggunakan fitur-fitur tertentu dalam SIPD RI dan



cenderung bergantung pada pegawai lain yang lebih menguasai sistem. Kurangnya pelatihan teknis secara intensif turut memengaruhi kepercayaan diri pegawai dalam mengoperasikan sistem secara mandiri. Selain itu, motivasi pegawai dalam menguasai sistem juga dipengaruhi oleh beban kerja yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian penting agar pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan secara optimal oleh seluruh individu dalam bidang tersebut.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2022) implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Struktur birokrasi di Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo telah disusun dengan pembagian tugas yang jelas, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan SIPD. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antarpegawai yang memiliki tugas saling berkaitan, sehingga alur kerja menjadi tidak efisien. Meskipun tanggung jawab telah terdistribusi, pelaksanaannya sering kali tidak selaras karena kurangnya penyesuaian waktu dan ritme kerja antarunit.

Selain itu, prosedur pelaporan masalah teknis ke pusat juga tergolong panjang dan berjenjang. Permasalahan harus melalui beberapa tahapan sebelum sampai ke pusat, yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kendala. Struktur ini belum dilengkapi dengan mekanisme cepat tanggap terhadap permasalahan yang bersifat mendesak. Kurangnya evaluasi berkala dan tindak lanjut atas masalah yang berulang juga menjadi catatan penting. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan jalur koordinasi dan peningkatan fleksibilitas birokrasi agar implementasi SIPD di Bidang Perbendaharaan Daerah dapat berjalan lebih optimal.

Hambatan Penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo



Dalam implementasi SIPD pada Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Purworejo, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi oleh para pegawai dan pejabat teknis. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama yang paling sering terjadi adalah gangguan teknis pada aplikasi SIPD. Salah satu contoh gangguan yang disebutkan adalah ketika sistem tidak bisa diakses sama sekali, khususnya pada saat menjelang tenggat waktu pencairan dana. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Gangguan sistem tidak bisa diatasi secara langsung oleh pegawai daerah karena SIPD sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, pegawai hanya bisa menunggu hingga sistem kembali normal, tanpa dapat melakukan tindakan teknis apa pun. Kondisi ini membuat arus kerja terganggu dan menimbulkan tekanan, terutama saat terjadi penumpukan dokumen yang harus segera diproses.

Hambatan lainnya adalah minimnya pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan terkait penggunaan SIPD. Sebagian besar pegawai mengandalkan pengalaman kerja dan belajar mandiri, karena tidak ada pelatihan formal yang rutin dilakukan. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai merasa kesulitan dalam memahami fitur-fitur baru pada SIPD, terutama ketika terjadi pembaruan sistem. Kurangnya waktu akibat beban kerja harian yang tinggi juga membuat pegawai kesulitan untuk mengeksplorasi sistem lebih dalam. Selain itu, respon dari pusat terhadap pelaporan kendala teknis dinilai kurang cepat dan tidak proporsional terhadap urgensi permasalahan di daerah. Prosedur pelaporan gangguan bersifat hierarkis dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sering kali, pegawai harus melaporkan kendala melalui beberapa jalur terlebih dahulu sebelum mendapat respon dari tim teknis pusat. Ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi tidak efisien.

Strategi Mengatasi Hambatan dalam Penerapan SIPD

Menghadapi berbagai kendala dalam penerapan SIPD, Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo telah mengembangkan sejumlah strategi untuk meminimalkan dampak hambatan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah membangun komunikasi dan koordinasi



internal yang solid di dalam bidang. Ketika terjadi gangguan sistem, para pegawai saling membantu menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan terlebih dahulu secara manual, sembari menunggu sistem kembali normal. Pendekatan kerja kolektif ini menjadi bentuk mitigasi terhadap ketergantungan pada sistem yang sering tidak stabil.

Di sisi lain, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan teknis sebagian pegawai, dilakukan proses pembelajaran informal secara berkelanjutan di lingkungan kerja. Pegawai yang lebih memahami sistem membantu rekan-rekannya yang mengalami kesulitan. Meskipun belum ada pelatihan resmi yang bersifat rutin, pendekatan internal ini cukup membantu dalam membagi pengetahuan secara praktis dan langsung. Selain itu, pimpinan bidang juga aktif memberikan dorongan dan arahan agar para staf dapat lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan sistem, termasuk saat terjadi pembaruan atau perubahan fitur. Strategi lainnya adalah dengan memperkuat hubungan dengan pihak pusat, terutama dalam hal pelaporan gangguan. Meskipun jalur pelaporan masih bersifat hierarkis, pegawai berupaya untuk mempercepat proses tersebut melalui komunikasi aktif via daring yang sudah tersedia. Dalam kondisi tertentu, pegawai bahkan mencoba mencari informasi mandiri mengenai solusi sementara dari gangguan yang terjadi, sembari terus berkoordinasi dengan atasan.

Melalui strategi-strategi tersebut, Bidang Perbendaharaan Daerah menunjukkan adaptasi yang cukup baik dalam mengatasi berbagai kendala implementasi SIPD. Namun demikian, strategi yang ada tetap memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, seperti pelatihan resmi, pembentukan tim teknis internal, serta perbaikan respon dari pusat agar efektivitas pelaksanaan sistem dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan SIPD pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal proses pencairan dan pencatatan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya seperti seringnya gangguan teknis dari sistem pusat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia



dalam pengoperasian SIPD, serta belum optimalnya pembagian tugas dan koordinasi di lingkungan internal bidang perbendaharaan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan proses kerja dan kurang maksimalnya pemanfaatan sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah- langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut agar sistem SIPD dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIPD di Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan tim pusat pengelola SIPD agar kendala teknis dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
2. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai di Bidang Perbendaharaan Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap penggunaan SIPD.
3. Menyusun sistem kerja internal yang lebih terstruktur dan efisien, termasuk pembagian tugas yang jelas serta evaluasi berkala terhadap kinerja penggunaan SIPD.
4. Mendorong adanya kolaborasi aktif antarpegawai dalam menyelesaikan permasalahan teknis secara bersama-sama dan meningkatkan semangat kerja tim di lingkungan Bidang Perbendaharaan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. Y., & Irvani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi* (E. Risanto (ed.); Ed.1). Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=8VNLDwAAQBAJ>
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage publications.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Indonesia, K. D. N. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70

- Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Peraturan BPK, Nomor 65(879)*, 2004– 2006.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September). Perbup Purworejo. (2022). *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 138 Tahun 2022*.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87).
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74.
- Suryabrata, S. (2014). *Metodelogi penelitian*. In Jakarta: Raja Grafindo Persada. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki (eds.)). MNC Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=1zQXEAAAQBAJ>
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.